

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Tjipto. 2012. *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Atmosudirjo,S,Prajudi. 2000. *Administrasi Manajemen Umum*. Jakarta: CV Mas Haji.
- Bustami. 2011. *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptabilitasnya*. Jakarta: Erlangga.
- Febriawati, Henni. 2013. *Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Sudarmo dan Mulyono. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Edisi pertama, cetakan keempat, Penerbit : BPFE – Yogyakarta
- Irawan, Prasetya. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : STIA-LAN
- Jogiyanto. 2005. *Analisa, Desain Sistem Informasi dan Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 1148. Tahun 2011. *Pedagang Besar Farmasi*. Jakarta : Menteri Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 889. Tahun 2011. *Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta : Menteri Kesehatan
- Peraturan Gubernur. Nomor 278. Tahun 2016. *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan*. Jakarta : Gubernur DKI Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. *Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 38. Tahun 2007. *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia
- Terry, George R. Tahun 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rachmawati. Tahun 2004. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Basis Meraih Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: Ekonisi

Siagian P, Sondang. Tahun 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 36. Tahun 2009. *Kesehatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 5. Tahun 1997. *Psikotropika*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23. Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35. Tahun 2009. *Narkotika*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia